



Bentuk BPBD, Dapat Kucuran Dana Pusat

JOGJA-Setelah lebih dari dua tahun sejak akhir 2010 terkatung-katung, nasib Raperda Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akhirnya menunjukkan kejelasan. DPRD dan Pemkot Jogja telah ada kata sepakat menyangkut kelembagaan badan khusus bencana tersebut.

Ini, bakal menjadi pertanda baik bagi penanganan bencana di Kota Jogja. Jika selama ini, pemkot selalu mengalami hambatan untuk mitigasi bencana, dengan adanya BPBD tersebut, mereka bisa mendapatkan dana dari pemerintah pusat dan Pemprov DIJ. Terlebih, Kota Jogja yang rawan bencana banjir lahar dingin, angin kencang, gempa bumi, maupun banjir karena hujan deras.

Asisten Sekretaris Kota (Sekkot) Bidang Pembangunan dan Perekonomian Aman Yuriadjaya memastikan, akhir Desember 2013, pembentukan BPBD sudah siap.

Raperda itu pun dalam waktu dekat ini sudah bisa diparipurnakan.

"Kalau tidak ada hambatan, termasuk pembahasan penganggaran BPBD, per Januari 2013, sudah bisa berjalan," tandas Aman di Balai Kota Timoho kemarin (13/11).

Aman mengungkapkan, masalah selama ini antara Pansus dengan tim eksekutif yaitu soal pejabat yang akan menjadi pucuk pimpinan BPBD juga telah sepakat. Dewan sudah setuju dengan usul eksekutif, kepala dari BPBD tersebut adalah *ex officio* (otomatis) Sekkot.

"Ketua pelaksanaannya akan dijabat eselon II B," sambungnya.

Soal tipe juga tak bermasalah. Kedua belah pihak telah menyepakati bentuk dari BPBD ini termasuk BPBD tipe A. Ini berarti, BPBD tersebut bakal lebih luas. Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana, dan Perlindungan Masyarakat bisa

masuk dalam struktur BPBD tersebut.

"Penganggarnya nanti otomatis akan masuk ke BPBD. Semoga, saja proses pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD tak mengalami hambatan," terang mantan Kepala Bappeda ini.

Pembentukan BPBD ini lanjut Aman, bisa menjadi lampu hijau soal penganggaran penanganan bencana. Pihaknya, kini bisa lebih fokus untuk penanganan bencana baik mitigasi maupun saat bencana dan pasca bencana. Sebab, secara anggaran, BPBD tersebut bisa mengakses dana dari BNPB maupun BPBD DIJ.

"Juga anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa terintegrasi dengan program dari BPBD ini," tandasnya.

Seperti telah diketahui, pembahasan Raperda BPBD ini sempat macet sampai

satu tahun lebih. Ini terjadi karena antara eksekutif dan legislatif mengalami perbedaan pendapat. Terutama soal tipe dan pejabat yang berada di pucuk pimpinan.

Sampai akhirnya, Senin (12/11) silam, dewan dan eksekutif bersepakat untuk kembali menyelesaikan pembahasan Raperda inisiatif dari dewan itu. Anggota Pansus Raperda BPBD Foki Ardianto mengungkapkan, pembahasan bisa langsung dilakukan. Bahkan, pada kali, minggu depan, Rapat Dengar Pendapat Umum (RD-PU) bakal segera dilakukan. Ini demi mengejar paripurna atau pengesahan raperda ini menjadi perda.

"Akhir bulan ini sudah bisa masuk evaluasi gubernur. Sehingga, selama satu bulan, eksekutif bisa mempersiapkan hal-hal pendukungnya dan Januari sudah bisa bekerja," tandas Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Jogja ini. **(eri/kus)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2.			
3. Kantor Penanggulangan Kebakara			

Yogyakarta, 19 Mei 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005